

**KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPATEN ENREKANG**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023**

Karya Tugas Akhir Mahasiswa

JUDUL PENELITIAN

**KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI
KABUPATEN ENREKANG**

Skripsi

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUHAMMAD DIRHAM JAMALUDDIN

NIM : 105711101419

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*

Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2023**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Ketahuiilah!!! Sesungguhnya bila kalian bersabar atas kesusahan yang sebentar saja

Maka kalian akan menikmati kesenangan yang panjang

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah

Rabbil'alam

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya beserta keluarga besar saya yang telah membantu dan memberikan dukungan hingga skripsi ini terselesaikan.

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 258 (Fax 0411) 860132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian: Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Terdapat: Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten

Nama Mahasiswa: Muhammad Darham Jamaluddin

No. Stambuk: 10521001010

Program Studi: Ekonomi Pembangunan

Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis

Pengantar Tinggi: Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa dan disetujui di depan

pada persidha Seminar Hasil Kerja (SHK) pada tanggal 13 Juli 2021 di

Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 20 Juli 2021

Menyatakan,

Pengantar II

Asdar, SE, M. Si
NIDN. 0963039003

Warda, SE, M. Si
NIDN. 0963039003

Dekan

Ketua Program Studi

Dr. H. Andi Am'an, SE, M.Si
NBM: 681 507

Asdar, SE, M. Si
NBM: 128 6845



PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No.256 (Fax:0411) 860132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Muhaimad Dirham, NIM : 105711101419 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0009/SK-V/2023/1061004/2023 M. Tanggal 11 Muharram 1445 H / 20 April 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Muharram 1445 H

2023 M

PANITIA UJIAN

1. Pembina Umum : Prof. Dr. H. Anshari, M.Pd.
(Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agumawati Suarni, S.E., M.Acc.
(Wakil Dekan / Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Anggota :
 1. Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
 2. Agumawati Suarni, S.E., M.Acc.
 3. A. Nur Firdausi, S.E., M.Si.
 4. Nur Achsanuddin, S.E., M.Si.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM: 651 50



PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No 250 (Fax: 0411) 880132 Makassar 90221

SURAT PERNYATAAN KEASAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Muhammad Dirham Jamaluddin

Stambuk: 105711101419

Program Studi: Ekonomi Pembangunan

Judul Skripsi: Analisis Badan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BUMKMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangkep

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil fotokopi dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Dengan pernyataan ini saya bertanggung jawab dan siap menerima sanksi sesuai pernyataan ini jika melanggar.

Makassar, 26 Juli 2020

Muhammad Dirham Jamaluddin

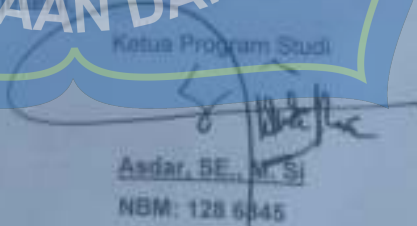
105711101419

Ketua Program Studi



Dr. H. Andi Sam'an, S.E., M.Si.

NBM: 651 507



Asdar, S.E., M.Si.

NBM: 128 6845

**HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dirham Jamaluddin

NIM : 105711101419

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya setuju untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Enrekang

Berserta persetujuan yang ada akan diberikan Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan mengulimada, format, dan mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

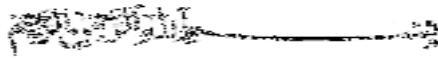
Makassar, 25 Juli 2023

Tanda Tangan

Muhammad Dirham Jamaluddin

NIM: 105711101419

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamina segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata'ala dan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wassallam atas segala Rahmat, Hidayat dan Karunia-Nya serta nikmat yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Enrekang”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan paling utama saya sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Drs. Jamaluddin dan Ibunda Ida Eli, S.Ag., M.Ag yang senantiasa memberikan harapan, semangat, motivasi dan mendoakan penulis disetiap sujudnya

Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Asdar, SE., M.Si selaku ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Asdar, SE., M.Si Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk sehingga tersusunnya skripsi ini.
5. Ibu Warda, SE.,ME Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk sehingga tersusunnya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Untuk kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberikan motivasi, arahan serta selalu mendoakan hal-hal terbaik terhadap penulis.
8. Untuk senior-senior saya di UKM Pahala Unismuh Makassar yang selalu memberikan arahan dan didikan kepada saya selama menjalankan studi.
9. Untuk teman-teman pilar XIX (Akatsuki XIX) yang merupakan sahabat terbaik dan kebersamaan penulis selama ini baik dalam kondisi susah maupun senang atas segala secerita yang telah dilalui Bersama.
10. Untuk teman-teman pengurus HIMAJEP 2022-2023 yang telah memberikan semangat dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
11. Serta semua pihak lain yang tidak sempat disebutkan satu persatu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat limpahan yang setimpal dari Allah SWT dan senantiasa skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas kebaikan semua. Akhir kata semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, terutama adik-adik di prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Makassar.

Akhirul Kalam, didasari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat beberapa ketidak sempurnaan sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah. Oleh karena itu sumbangsi kritikan yang bersifat konstruktif dari semua pihak merupakan penghargaan dan kehormatan bagi penulis. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Makassar, Juli 2023

Muhammad Dirham Jamaluddin

ABSTRAK

Muhammad Dirham Jamaluddin. *Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang*. Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I Asdar. dan Pembimbing II Warda.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif. Data yang di olah adalah data Primer dan Sekunder dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2013-2022 di Kabupaten Enrekang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang dalam rentan waktu 2013-2022 memiliki rata-rata sebesar 15% dimana kontribusi tertinggi yang pernah di capai yaitu 23% pada tahun 2019 dan kontribusi terkecil yaitu 9% yaitu pada tahun 2014 dan 2016 jadi secara kumulatif BUMD di Kabupaten Enrekang memberikan kontribusi yang masih sangat kurang karena hanya mencapai nilai kontribusi sebesar 15% selama 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2013-2022.

Kata Kunci : BUMD dan PAD

ABSTRACT

Muhammad Dirham Jamaluddin. *The Contribution of Regional Owned Enterprises (BUMD) to Local Original Revenue (PAD) in Enrekang Regency.* Thesis of Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor Asdar and Co-Supervisor Warda

This study aims to determine the amount of contribution of Regional Owned Enterprises (BUMD) to Regional Original Revenue (PAD) in Enrekang Regency. The type of research used in this study is Descriptive Quantitative. The data processed are Primary and Secondary data from Regional Owned Enterprises (BUMD) for the last 10 years, namely from 2013-2022 in Enrekang Regency.

The results showed that the contribution of Regional Owned Enterprises (BUMD) to Regional Original Revenue (PAD) in Enrekang Regency in vulnerable time 2013-2022 has an average of 15% where the highest contribution ever achieved was 23% in 2019 and the smallest contribution was 9%, namely in 2014 and 2016, so cumulatively BUMD in Enrekang Regency contributed which is still very less because it only reached a contribution value of 15% for 10 years. The last year was from 2013-2022.

Keywords: BUMD and PAD

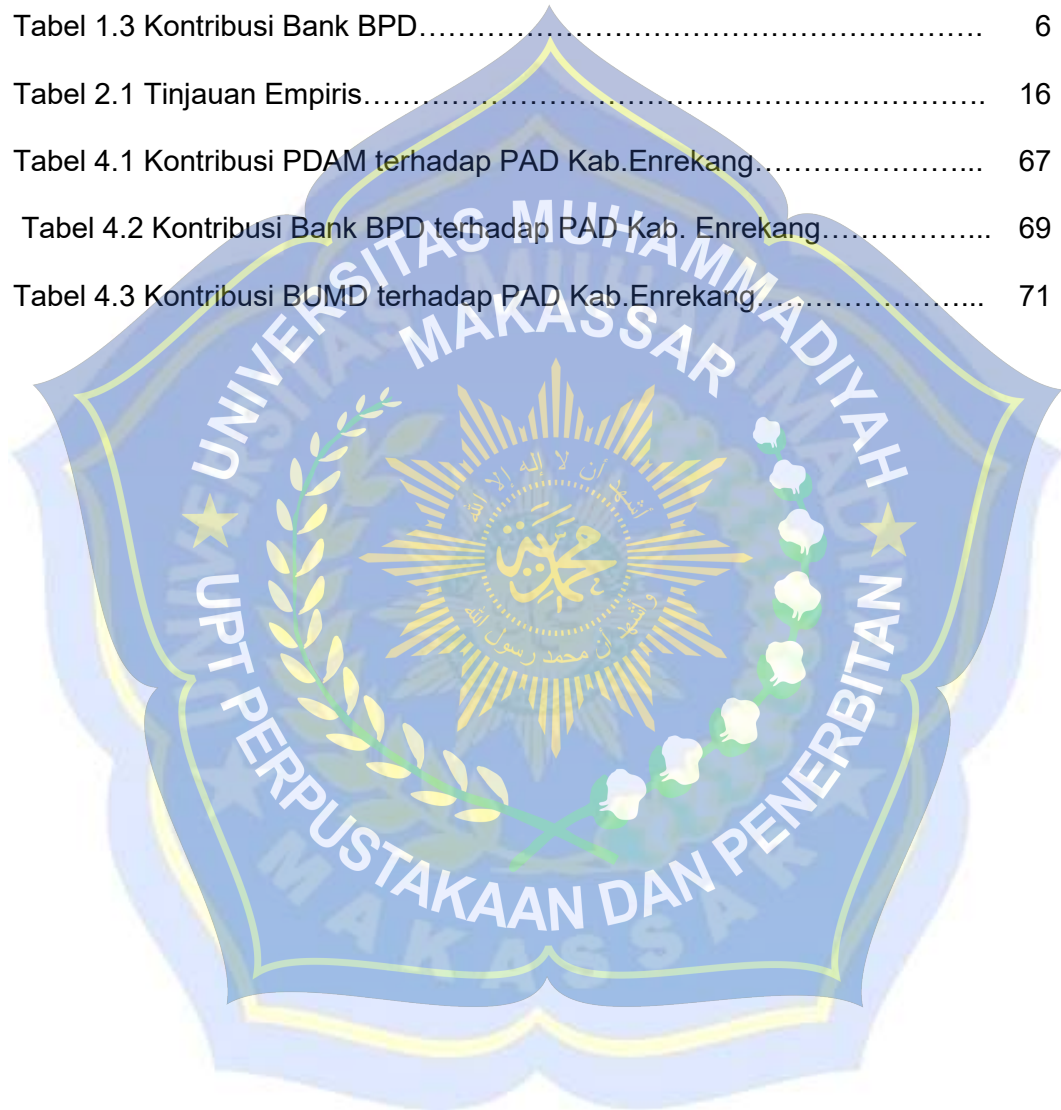
DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
JUDUL PENELITIAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Teori	8
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	8
2. Konsep Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	10
B. Tinjauan Empiris	16
C. Kerangka Pikir.....	28
D. Hipotesis	29

BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Populasi dan Sampel	42
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Defenisi Operasional Variabel.....	43
G. Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	45
B. Hasil Penelitian	66
C. Pembahasan.....	72
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi PAD Kabupaten Enrekang.....	3
Tabel 1. 2 Kontribusi PDAM Tirta Massenrempulu.....	5
Tabel 1.3 Kontribusi Bank BPD.....	6
Tabel 2.1 Tinjauan Empiris.....	16
Tabel 4.1 Kontribusi PDAM terhadap PAD Kab.Enrekang.....	67
Tabel 4.2 Kontribusi Bank BPD terhadap PAD Kab. Enrekang.....	69
Tabel 4.3 Kontribusi BUMD terhadap PAD Kab.Enrekang.....	71



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4.1: Struktur Organisasi.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak di berlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dimana perintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mencari dan mendapatkan sumber keuangan daerahnya sendiri yang sumber-sumbernya tersebut tertuang dalam pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap daerahnya sendiri dan terhadap pemerintah pusat dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah diantaranya melalui retribusi daerah dan mengelolah sumber daya alam yang di miliki di daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah.

Dalam otonomi daerah, salah satu indikator keberhasilan daerah atau yang disebut dengan kemandirian daerah yaitu dapat dilihat dari kondisi PAD daerahnya. Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya dalam membiayai semua penyelenggaraan daerah dan dapat mengurangi ketergantungan kepada

pemerintahan pusat sehingga di harapkan PAD memberikan peranan terbesar dalam keuangan daerah.

Dilihat dari sisi pendapatan, keuangan daerah yang berhasil adalah jika keuangan daerah mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkelanjutan seiring dengan perkembangan perekonomian di daerah tersebut tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan rasa keadilan dalam masyarakat serta dengan biaya untuk mendapatkan penerimaan daerah secara efektif dan efisien (Luigi, dkk 2017)

PAD yang merupakan sumber utama dalam penerimaan daerah maka dalam pelaksanaanya haruslah memperhatikan hal-hal yang menjadi sumber penerimaan PAD agar dapat optimal. PAD yaitu jenis penerimaan daerah yang wajib di tingkatkan pertumbuhan pendapatannya, dengan melakukan pungutan yang sudah di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Yani, 2002). Selain itu, PAD menjadi indikator dalam menentukan kemandirian daerah. Karena semakin tinggi penerimaan PAD akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal keuangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bukti kongkrit dukungan masyarakat kepada pemerintah dalam meningkatkan kualitas daerahnya serta bukti bahwa pemerintah daerah bisa mempertanggung jawabkan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat. Dalam pemerintahan sumber pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang tiap tahunnya ditarget dimana Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang

mengurusinya, mengupayakan berbagai cara agar supaya target yang di bebaskan bisa dilampaui. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang yaitu terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lainnya Pendapatan Asli Daerah yang sah. Berikut table realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2020.

Tabel 1.1: Realisasi PAD Kabupaten Enrekang 2016-2020

Tahun	Total PAD yang terealisasi (Rp)
2016	54.633.224.642,95
2017	99.669.276.952,37
2018	66.043.333.304,23
2019	73.239.444.538,35
2020	78.247.324.549,96

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Enrekang

Untuk menciptakan penerimaan PAD melalui pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan tersebut, dilakukan antara lain melalui pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di berbagai provinsi dan Kabupaten. Dengan pendirian BUMD diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan pendapatan yang di perlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di daerah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertugas untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat dan diberikan tugas untuk mendapatkan keuntungan dibidang usahanya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari deviden yang disetorkan kekas daerah. Deviden yang diperoleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut akan menjadi

pendapatan pemerintah daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja

Kabupaten Enrekang sendiri memiliki banyak potensi sumber daya alam yang bisa di manfaatkan untuk pendirian berbagai macam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) namun pada realitanya Kabupaten Enrekang hanya memiliki dua Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM Tirta Massenrempulu yang merupakan BUMD Murni dan Bank BPD yang merupakan BUMD tidak murni.

PDAM Tirta Massenrempulu mulai beroperasi sejak Badan Pengelolaan Air Minum (BPAM) diserahkan kepada Bupati Enrekang dengan Berita Acara No. 690/6283/Ekon per 690/1067/Ekon tanggal 16 Desember 1992. Dimana PDAM Tirta Massenrempulu diharapkan dapat turut serta melaksanakan (1) pembangunan daerah, (2) melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat. Menuju masyarakat Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila. (3) Mengusahakan penyediaan air minum yang sehat dan memenuhi syarat bagi masyarakat.

PDAM Tirta Massenrempulu merupakan salah satu aset Kabupaten Enrekang yang di dirikan untuk pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang. Sebagai salah satu sumber PAD diharapkan bisa menjadi penunjang sumber pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga bisa membantu penanggulangan masalah pendanaan bersama.

Berikut table laporan laba rugi PDAM Tirta Massenrempulu untuk periode 2015-2019.

Tabel 1.2 : Kontribusi PDAM Tirta Massenrenpulu Terhadap PAD
Periode 2013 - 2017

No	Tahun	Laba BUMD (Rp)	kontribusi (%)
1	2013	50.000.000,00	0,19%
2	2014	50.000.000,00	0,15%
3	2015	50.000.000,00	0,10%
4	2016	75.000.000,00	0,14%
5	2017	100.000.000,00	0,10%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Kab.Enrekang

Tingkat kontribusi PDAM terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun 2015-2019 tidak mampu memperoleh laba dengan baik dilihat dari besarnya presentase setiap tahunnya.

Bank BPD merupakan salah satu Lembaga keuangan yang memperoleh pendapatan berupa bunga yang di peroleh dari debitur. Pemerintah Kabupaten Enrekang sendiri memiliki saham di dalamnya yang di peroleh dengan penanaman modal menggunakan APBD Kabupaten Enrekang.

Berikut table kontribusi Bank BPD terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang.

**Table 1.3: Kontribusi Bank BPD Kab.Enrekang terhadap PAD
Kab.Enrekang periode 2013-2017**

NO	Tahun	Kontribusi Bank BPD (Rp)	kontribusi (%)
1	2013	2.720.422.551,00	10%
2	2014	2.862.293.695,00	8%
3	2015	3.337.902.299,67	7%
4	2016	4.751.158.746,00	9%
5	2017	12.255.808.162,48	12%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Enrekang

Dari data yang dipaparkan diatas, dimana PDAM dan Bank BPD yang merupakan BUMD yang ada di Enrekang memunculkan pertanyaan seberapa mampu iya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Enrekang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seberapa besar kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumber ilmu pengetahuan dan menambah wawasan lebih dalam dan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis ini dimasa depan.
- b. Memberikan masukan terhadap instansi terkait untuk dijadikan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terkait.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak terkait sebagai bahan perbandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian yang sama.
- b. Melalui penelitian ini penulis juga mengetahui dan sebagai pembelajaran penulis untuk masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah adalah hasil yang diperoleh oleh pemerintah suatu daerah untuk memenuhi kebutuhannya, pendapatan daerah juga berarti pendapatan yang dihasilkan oleh daerah dari hasil kegiatan yang dilakukan, yang dalam artian disini bahwa segala kegiatan yang menghasilkan atau menambah keuangan daerah maka itulah pendapatan daerah. Yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari apa yang dihasilkan kemudian dikumpulkan sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah tersebut. Umumnya pendapatan daerah ini digunakan dalam rangka meningkatkan kemajuan daerah baik itu pembangunan maupun pelayanan masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hasil yang diterima daerah yang berasal dari sumber-sumber daerah, baik melalui sumber dayanya maupun hasil dari kebijakan daerah itu sendiri. Disimpulkan bahwa ada unsur penting jika kita membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil asli daerah yang dimiliki atas pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan aturan daerah.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah adalah salah satu bagian penerimaan kas daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan kemajuan masyarakat daerah dalam segala bidang kehidupan, dalam hal ini pemerintah daerah sebagai aksiliator yang menjadi pemimpin membuat kebijakan dalam menjalankan perekonomian, pendapatan daerah ini sebagai salah satu aspek pendukung bagi pemerintah daerah dalam menjalankan ekonomi daerah dan mendukung peningkatan pembangunan daerah. Adapun yang mejadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hasil yang di peroleh dari gabungan pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan lain yang dipisahkan dan lain-lain yang menjadi fokus utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

c. Perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah dan seluruh pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan pemerintah daerah, sebagai penambah sumber pendapatan kas daerah yang digunakan untuk mengelolah daerah itu sendiri.

Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

$$\text{PAD} = \text{PD} + \text{RD} + \text{H} + \text{Lain-lain PAD yang sah}$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

H = Hasi kekayaan Alam yang di pisahkan

d. Manfaat Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Ekonomi Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah atas hasil kebijakan pengelolaan daerah, seperti pajak, retribusi daerah dll. Dana yang berasal dari pendapatan asli daerah merupakan salah satu bagian yang mendukung pelaksanaan kewajiban daerah dalam hal pembiayaan belanja rutin dan pembiayaan pembangunan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian daerah, apabila jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar maka pengaplikasiannya terhadap pembangunan ekonomi akan jauh lebih baik, Hasil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diaplikasikan terhadap pembiayaan daerah.

2. Konsep Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

a) Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan bagian salah satu kebijakan pemerintah terkait mendukung perekonomian daerah, manfaat dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan mampu mendukung kemajuan ekonomi daerah. Awal mulanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikenal pada zaman dahulu istilah *Nederlandsch-indie* yang mendorong munculnya *Provinciale-bedrijven*,

Gemeetebedrijven berkaitan dengan faktor sejarah berdirinya perusahaan daerah. (Yudho,2017)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan milik pemerintah daerah yang seluruh atau Sebagian besar modal usahanya berasal dari kekayaan atau harta daerah yang dipisahkan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang merupakan pelaku ekonomi di daerah diharapkan mampu memberikan nilai tambah berupa perolehan keuntungan atau laba dalam bentuk deviden. Hal ini menjadi penting karena Sebagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu faktor pendukung dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Samidi,2021)

Adapun yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 dan pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 adalah badan usaha seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah.
- 2) Badan usaha dimiliki oleh:
 - a) 1 (satu) pemerintah daerah.
 - b) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah
 - c) 1 (satu) pemerintah daerah atau dengan bukan daerah
 - d) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah

- 3) Seluruh atau Sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Bukan merupakan organisasi perangkat daerah
- 5) Dikelolah dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

b) Bentuk-bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2014 berkenaan dengan pemerintah daerah, dimaksudkan disini bahwa BUMD badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang modalnya dimiliki oleh daerah. Ada dua bentuk BUMD sebagai berikut :

- 1) Perusahaan umum daerah yaitu salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang modalnya berasal dari pemerintah Daerah tetapi tidak terbagi atas saham, karena perusahaan ini bersifat umum
- 2) Perusahaan perseroan daerah adalah kebalikan dari perusahaan umum daerah, dimana dalam perusahaan ini modalnya terbagi atas saham paling sedikit 51% dimiliki oleh daerah.

c) Sumber modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Sumber modal Badan Usaha Milik Daerah yaitu :

- 1) Penyertaan modal daerah ; dalam hal ini yang dimaksud adalah APBD, anggaran APBD yang diberikan untuk pembiayaan modal BUMD dan atau bisa juga piutang pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah, serta konversi dari pinjaman yang berarti bahwa pinjaman daerah yang telah disalurkan sebagai modal kepada BUMD.
- 2) Pinjaman, Hibah

3) Sumber modal lainnya, maksud disini adalah penambahan modal dari sumber lainnya yang sesuai aturan Pemerintah Daerah, modal tersebut contohnya seperti modal dari cadangan, keuntungan revaluasi aset dan Aigo saham

d) Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Menurut Racmawati (2004) yang dimaksud kinerja adalah rekapan (catatan) atas hasil yang berkenaan atas suatu kegiatan yang dikerjakan, berupa pencatatan fungsional dari suatu kegiatan. Dalam hal ini yang menjadi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sebuah lembaga daerah dalam rangka kemampuan untuk :

- 1) Dapat mampu membayar segala tanggungan (Hutang-hutang) dalam waktu jangka yang pendek.
- 2) Memperoleh laba / keuntungan atas kinerja yang telah dilakukan
- 3) Hasil keuntungan / aset yang dimiliki lebih besar dari kewajiban tanggungan (misalnya hutang – hutangnya)

Sebuah kinerja akan menghasilkan suatu tujuan yang telah menjadi fokus utama dalam kegiatan yang dilakukan, dalam hal ini kinerja BUMD yang sesuai dengan operasionalnya dan kinerja yang loyalitas terhadap apa yang menjadi tugas akan mampu meningkatkan hasil yang didapat.

e) Fungsi dan Peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Setiap kegiatan operasional memiliki fungsi tersendiri, begitupun dengan BUMD, yang menjadi fungsi dan peranan BUMD adalah:

- 1) Melaksanakan kegiatan yang berdasarkan atas kebijakan pemerintah daerah mengenai ekonomi maupun pembangunan daerah agar lebih maju.
- 2) Sebagai pemasok dana / membantu terhadap pembiayaan pembangunan, dalam hal ini BUMD membantu penyaluran pembiayaan usaha.
- 3) Menumbuhkan semangat masyarakat dalam bidang usaha, karena dalam hal ini BUMD membantu penyaluran pembiayaan usaha.
- 4) Sebagai penghasil barang dan pelayanan jasa yang membantu terhadap kepentingan masyarakat.

f) Tujuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Adapun yang menjadi tujuan didirikannya BUMD adalah :

- 1) Memberikan manfaat terhadap ekonomi daerah, misalnya meningkatkan perekonomian daerah sesuai dengan jenis operasional yang dilakukan.
- 2) Mampu memberikan kebermanfaatan umum bagi ekonomi daerah, misalnya penyediaan barang / jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat daerah yang pengelolaannya berkaitan dengan potensi / sumber yang dimiliki daerah dan dikelola dengan baik sejalan dengan aturan yang berlaku
- 3) Mendapatkan laba / keuntungan yang menjadi penambahan bagi keuangan daerah.

g) Ciri-ciri Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki berbagai ciri khusus, Diantaranya :

- 1) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan dan diawasi oleh pemerintah daerah.
- 2) Pemerintah mempunyai kekuasaan absolut, karena sebagai pemegang hak kekayaan usahanya.
- 3) Pemerintah daerah menguasai seluruh atau sebagian besar modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- 4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dipimpin oleh seorang direksi yang bisa diangkat dan diberhentikan kepala daerah (bupati, walikota atau gubernur).
- 5) Segala risiko yang terjadi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditanggung secara penuh oleh pihak pemerintah.
- 6) Sebagai penyumbang kas atau sumber pendapatan daerah bahkan negara.
- 7) Sebagai instrumen penting guna pengembangan ekonomi di daerah dan nasional.
- 8) Tidak semata-mata mencari keuntungan, karena laba harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi tujuan BUMD tidak untuk mengumpulkan keuntungan sebesar mungkin tapi dengan modal sekecil mungkin.
- 9) Pemegang saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah pemerintah.
- 10) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa menghimpun dana atau keuangan dari berbagai pihak seperti lembaga perbankan dan non bank.

B. Tinjauan Empiris

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	M.Lazuardi Tahun 2018	Analisis Kontribusi Daerah Dan Laba Bumda Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kalimantan Selatan	X_1 =retribusi daerah X_2 =Bumda Y =PAD	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah dan laba BUMD terhadap PAD di Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2014-2016 masih rendah. Kemudian dalam periode 2014-2016 hasil dari efektivitas retribusi daerah dan BUMD sangat efektif. Ini artinya realisasi dari retribusi daerah dan laba BUMD dalam periode 2014-2015 selalu mencapai target. Kemudian upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan sekaligus kontribusi retribusi

					daerah terhadap PAD yaitu melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan upaya untuk meningkatkan penerimaan BUMD yaitu melalui penataan ulang serta perbaikan manajemen perusahaan, pelatihan atau pembinaan pengelola BUMD.
2.	Nurmiati, Fina Diana, Murbayani Tahun 2019	Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar	$X = \text{BUMD}$ $Y = \text{PAD}$	Analisis Regresi Linier Sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata sebesar 110,68%, kemudian tingkat efektivitas penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama lima tahun terakhir

					secara rata-rata sebesar 90,49 atau berada pada kategori efektif, selanjutnya kontribusi penerimaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar selama lima tahun terakhir secara rata-rata sebesar 1,73 atau berada pada kategori sangat kurang.
3.	Rindi Safira¹, Muhammad Yafiz² Maret 2022	Analisis Pengaruh Kontribusi Bumd Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sumatera Utara	X= BUMD Y= PAD	Analisis Regresi Linier Sederhana	Dari hasil uji yang dilakukan di simpulkan bahwa adanya kontribusi BUMD (dalam hal ini laba) menambah pendapatan asli daerah di Sumatera utara, yakni kontribusi yang diberikan sebesar 9,24% pada tahun 2020 dan 11,06% pada tahun 2021, hal ini berdampak pada jumlah PAD yaitu 5967,65 M untuk tahun

					2020 serta 5991,15 M pada tahun 2021
4.	Heriasman, Suwaji Tahun 2021	Efektifitas Dan Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Indragiri Hulu	X= BUMD Y= PAD	deskriptif kuantitatif	Hasil analisis menunjukkan, target PAD belum sepenuhnya dapat direalisasikan, secara rata-rata pertumbuhan realisasi PAD lebih kecil dari target, target rasio efektifitas laba BUMD masuk dalam kategori Kurang Efektif. Kontribusi laba BUMD terhadap PAD masuk pada kategori sangat kurang, dan laba BUMD memberikan kontribusi terkecil terhadap PAD bila dibandingkan dengan komponen-komponen PAD lainnya. solusi dari permasalahan manajemen BUMD Kabupaten Indragiri Hulu adalah memperbaiki manajemen

					internal agar dibuat lebih ramping dan adaptif sesuai dengan kebutuhan, menyikapi dengan bijak ancaman dari eksternal dengan memberikan perhatian pada perbaikan mutu produk dan jasa serta fokus dalam mengembangkan usaha agar BUMD mampu tumbuh dan berkembang dengan membuat proyeksi yang jelas dan serius dalam menjaga keberlanjutan usaha BUMD
5.	Heince Jusva Rumende, Vekie A. Rimate, Debby Ch. Rotinsulu Tahun 2019	Analisis Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Di Pt. Bank Sulutgo)	$X = \text{BUMD}$ $Y = \text{PAD}$	Analisis Regresi Linier Sederhana	Hasil penelitian menunjukan Pendapatan Asli Daerah ternyata mempunyai hubungan yang tidak terlalu besar dengan pembagian dividen badan usaha milik daerah sehingga

					kontribusi peningkatan yang terjadi pada pembagian dividen masih belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah juga masih belum bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Utara. Secara keseluruhan bahwa baik pembagian dividen, Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi masih belum mempunyai hubungan yang signifikan sehingga peningkatan yang terjadi di pembagian dividen belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan
--	--	--	--	--	--

					asli daerah dan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
6.	Eka Meiliyah Dona, Agnes Widya Putri, Anis Feblin, Gitta Destalya Adrian Nova Tahun 2022	Pengaruh Pajak Daerah, Laba Bumd Terhadap Pad Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan	X_1 =pajak X_2 =BUMD Y = PAD	Analisis Regresi linier Sederhana	Secara simultan variable pajak daerah dan laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil dari koefisien determinasi R square menunjukkan sebesar 0.858, artinya besarnya kontribusi atau besarnya pengaruh variable indeviden yaitu pajak daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap variabel devenden yaitu pendapatan asli daerah Kabupaten Kota di provinsi

					Sumatra selatan selama lima tahun sebesar 85.8% sedangkan sisanya 14.2% di tentukan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam mode penelitian ini seperti retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah.
7.	Rizky Dwi Nur Annisa Tahun 2017	Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur	$X_1 = \text{pajak}$ $X_2 = \text{retribusi}$ $X_3 = \text{BUMD}$ $Y = \text{PAD}$	Analisis Linier Berganda	Hasil dari analisis uji t menunjukkan bahwa (1) Pajak daerah memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$ (2) Retribusi daerah memiliki nilai signifikan $0,014 < 0,05$, dan (3) laba BUMD memiliki nilai signifikan $0,006 < 0,05$. Dan hasil dari Uji t menunjukkan bahwa (4) pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Maka, dapat disimpulkan

					bahwa pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD)
8.	Astrie Merisa Ramadanti, Rahma Nazila Muhammad, Aisyah Vanadia Rubianto. Tahun 2022	Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Laba Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bandung (Studi Kasus Pada Bumd Kota Bandung)	$X = \text{BUMD}$ $Y = \text{PAD}$	Analisis Regresi Linier Sederhana	Hasil data analisis menunjukkan bahwa efektivitas laba BUMD Kota Bandung masih belum efektif kategori, dengan kontribusi yang sangat minim. Ada kendala yang dihadapi BUMD Kota Bandung di meningkatkan laba yaitu manajemen perusahaan, kemampuan modal usaha, pemeliharaan aset, pelayanan kemampuan, tarif, dan sumber daya manusia. Upaya sedang dilakukan BUMD Kota Bandung untuk

					mengatasinya Ini dan untuk meningkatkan laba, yaitu dengan mengurangi biaya operasional, mengembang kan penggunaan informasi teknologi, memelihara dan memanfaatka n aset secara optimal, memberikan kemudahan dalam pelayanan, meningkatkan kompetensi karyawan.
9.	Jouzar Farouq Ishak, Ridwan Zulpia agha, Eliza Noviriani, U. Ari Alrizwan. Tahun 2020	Kontribusi Dan Efektifitas Laba Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	$X = \text{BUMD}$ $Y = \text{PAD}$	Analisis Regres i Linier Sederh ana	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi maupun efektifitas laba badan usaha milik daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dari hal-hal tersebut badan usaha milik daerah harus melakukan perubahan- perubahan seperti perubahan pola pikir,

				perubahan budaya kerja dan perubahan target yang harus dicapai sehingga badan usaha milik daerah dapat menjadi sumber pendapatan daerah dengan tetap berpegang teguh bahwa badan usaha milik daerah tidak hanya mencari keuntungan semata, akan tetapi mengedepankan peningkatan pelayanan public.
10.	Azfril Tahun 2018	Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang	Anallisi Linier Berganda	Hasil penelitian ini adalah Laporan keuangan pada Badan Usaha Milik Daerah telah benar-benar sesuai dengan peraturan dalam negeri no 13 tahun 2006 tentang laporan keuangan pemerintah daerah dilihat dari pencatatan laporan kertas kerja, neraca, laba rugi,

					ekuitas, arus kas, pajak, piutang, persediaan, dan pelaporan kas telah dilaporkan secara tertib, taat perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab dengan memperlihatkan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat dan Badan Usaha Milik Daerah tidak berkontribusi baik terhadap Pendapatan Asli Daerah dilihat dari besarnya persen yg didapat dari rentanbilitas terhadap modal sendiri sebanyak - 17% dari laporan laba rugi perusahaan, namun perlu dikehui bahwa BUMD memberikan kontribusi sebanyak Rp.1 00.000.000.00 ditahun yg digunakan untuk belanja”
--	--	--	--	--	---

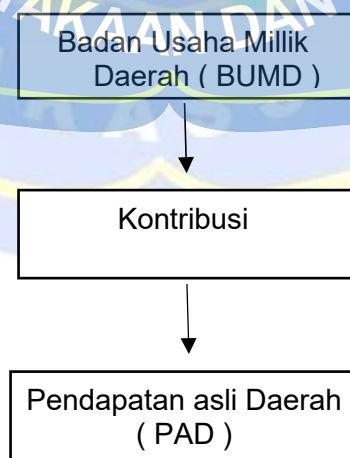
C. Kerangka Pikir

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah sebuah perwujudan dari era pemerintahan daerah dalam pengembangan ekonomi daerah, namun demikian perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) justru menjadi titik lemah keuangan daerah.

Kaca mata bisnis sebenarnya banyak BUMD yang tidak memberikan keuntungan, namun kita harus mengingat bahwa banyak BUMD yang tujuannya memberikan pelayanan kepada publik dan memang tidak profit oriented. Hal ini karena ada komoditas tertentu yang sebaiknya ditangani pemerintah, misalnya pengadaan air bersih.

Kontribusi laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Enrekang sangat diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga mampu mendorong peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah di Kabupaten Enrekang dan percepatan pembangunan.

Dari penjelasan tersebut penulis dapat menerapkan kerangka berfikir penelitian pada BUMD sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka pikir

D. Hipotesis

Hipotesis Adalah jawaban sementara yang diangkat oleh seorang peneliti terhadap objek penelitiannya yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan kerangka berfikir yang diuraikan, penulis mengajukan hipotesis yaitu Diduga bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Deskriptif Kuantitatif. Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2012: 8) yaitu : “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan” Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan Asli Daerah di tempat penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan data yang dibutuhkan, maka penulis memilih penelitian pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang.

2. Waktu penelitian

Adapun estimasi waktu yang dibutuhkan oleh penulis untuk memperoleh data direncanakan kurang lebih 2 (dua) Bulan, yakni bulan Maret – April 2023.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil BUMD baik dalam bentuk informasi secara lisan maupun secara tertulis.
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari BUMD yang diteliti dalam bentuk angka – angka dan dapat digunakan untuk pembahasan lebih lanjut.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamatan langsung pada perusahaan dan wawancara secara langsung dengan pimpinan beserta stafnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan atau internet berupa dokumen – dokumen dan buku literatur serta laporan tertulis dari luar perusahaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat pemerhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data – data, jika seorang manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama banyaknya manusia(Margono, 2004). Populasi dalam penelitian ini adalah data keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang.

2. Sampel

Sampel adalah wakil atau salah satu bagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama yang menggambarkan dan dapat mewakili seluruh populasi yang diteliti (Soegiyono, 2013). Adapun sampel pada penelitian ini adalah data laporan keuangan PDAM Tirta Massenrempulu dan Bank BPD selama 10 tahun terakhir yaitu tahun 2013-2022.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan studi kasus dan pengumpulan data yaitu melalui penelitian Pustaka (*Library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Yaitu peneliti mengumpulkan data yang berhubungan dengan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah terhadap pendapatan asli daerah

baik itu melalui media internet atau mendatangi perpustakaan yang menyediakan data yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

yaitu penelitian yang dilakukan dimana penulis melakukan tinjauan langsung terhadap objek penelitian untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam pengumpulan data ini peneliti melakukan beberapa cara yaitu :

- a) Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.
- b) Wawancara yaitu melakukan interview dengan melakukan wawancara secara langsung dengan Kepala Bagian Umum atau atau kepala bagian lainnya atau sejumlah personil yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang modalnya terbagi atas saham paling sedikit modalnya 51% (Lima puluh satu persen) modalnya dimiliki oleh satu daerah. Maka badan usaha BUMD adalah suatu badan usaha yang modalnya seluruh atau sebagian dimiliki oleh daerah. yang dapat dikatakan BUMD atau perusahaan milik daerah adalah jika seluruh atau minimal 51% modalnya dimiliki oleh pemerintah.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah berupa hasil dari penerimaan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan, dan lain – lain pendapatan yang sah (Halim, 2007).

G. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kontribusi. Analisis kontribusi Badan Usaha Milik daerah digunakan untuk mengetahui Kontribusi dari penerimaan laba BUMD dalam mendukung pendapatan daerah. Analisis ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan dari laba Badan Usaha Millik Daerah (BUMD) dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun rumus kontribusi yaitu :

$$\text{Kontribusi Laba BUMD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Laba BUMD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Presentase Kriteria

0-10% Sangat kurang

11-20% Kurang

21-30% Sedang

31-40% Cukup Sedang

41-50% Baik

Diatas 50% Sangat Baik

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Kab.Enrekang

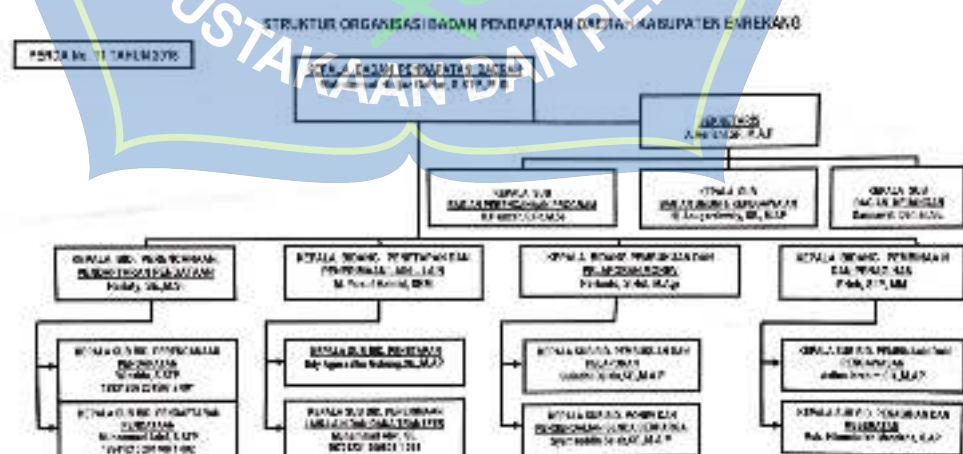
Pada awalnya Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang (Sulawesi-Selatan) berdiri sendiri yang berpedoman pada keputusan Gubernur sul-sel sejak tahun 1950. Dengan keadaan kantor yang masih memadai sarana dan prasarana, dengan jumlah staf yang banyak sehingga mempermudah penyelesaian pekerjaan.

Tetapi sesuai dengan peraturan Bupati Enrekang Nomor 35 Tahun 2008 maka kantor Dinas Pendapatan Daerah dijadikan satu dengan kantor Dinas yang lain yang antaranya Kantor Dinas Anggaran dan Perbendaharaan, kantor Dinas Keuangan, dan kantor Dinas Pengelolaan Aset Daerah. Tetapi karena ada peraturan Bupati Tahun 2008 maka kantor-kantor dinas tadi dijadikan dalam satu wadah yaitu kantor Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Yang di mana nantinya kantor dinas tadi pilih sesuai dengan bidangnya. Untuk segala aktivitas, jumlah staf dan sarana dan prasarana juga terbatas karena keadaan penggabungan kantor tersebut.

Sejak turunya surat Bupati Enrekang, maka secara resmi kantor Dinas Pendapatan Daerah menjadi Bidang Pendapatan. Kemudian kantordinas pengelolaan keuangan daerah dipisahkan menjadi dua kantor yaitu kantor badan pengelola keuangan daerah dan Badan

2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Dalam menjelaskan suatu keadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang membutuhkan maka perlu untuk menyusun suatu struktur organisasi agar nampak dengan jelas bagaimana organisasi dengan pendelegasian jabatan tersebut dan bagaimana proses pelaksanaan dari pada kegiatan dan jabatan tersebut. Adapun bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang sebagai berikut:



Gambar 4.1: Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang

- a. Kepala Badan
- b. Sekertaris
 - 1. Kasubag Perencanaan
 - 2. Kasubag Umum dan Kepegawaaian
 - 3. Kasubag Keuangan
- c. Kepala Bidang Penrencanaan, Pendaftaran dan Pendataan
 - 1. Kasubag Perencanaan Pendapatan
 - 2. Kasubag Pendaftaran Pendataan
- d. Kepala Bidang Penetapan dan Penerimaan Lain-Lain
 - 1. Kasubag Penetapan
 - 2. Kasubag Penerimaan Lain-Lain dan Dana Transfer
- e. Kepala Bidang Pembukuan dan pelaporan Monev
 - 1. Kasubag pembukuan dan pelaporan
 - 2. Kasubag Bidang Monev dan Pengendalian Benda Berharga
- f. Kepala bidang Pembinaan dan Penagihan
 - 1. Kasubag Pembinaan dan Pengawasan
 - 2. Kasubag Penagihan dan Keberatan

3. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kab.Enrekang

a. Visi

Terwujudnya Optimalisasi Penerimaan Daerah untuk membangun Enrekang maju, Aman, dan Sejahtera (EMAS)

b. Misi

1. Mengoptimalkan seluruh pendapatan daerah berdasarkan potensi yang di miliki.
2. Meningkatkan pengendalian pengelolaan penerimaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur agar penatausahaan pengelolaan penerimaan keuangan daerah dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel

4. Tugas Pokok,Fungsi dan Uraian Tugas Badan Pendapatan daerah Kab.Enrekang

a. Kepala Badan Pendapatan Daerah

- 1) *Badan Pendapatan Daerah* dipimpin oleh seorang *Kepala Badan*, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang pendapatan daerah serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- 2) Dalam melaksanakan tugas kepala badan pendapatan daerah berfungsi sebagai berikut :

a) Menyusun program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah baik dalam jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

b) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan yang meliputi urusan umum, kepegawaian dan urusan keuangan.

c) Perumusan kebijakan secara teknis bidang pendapatan

d) Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pendaftaran, bidang pendataan, bidang penetapan, bidang pembukuan pelaporan dan bidang pembinaan dan pengawasan

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3) Berdasarkan fungsinya *Kepala Badan Pendapatan Daerah*, maka didalam pelaksanaannya mempunyai beberapa uraian tugas sebagai berikut :

a) Menetapkan program kerja dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

b) Memberikan petunjuk kepada Sekretaris dan Kepala Bidang baik secara tertulis maupun lisan agar tugas-tugas dapat diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Menyelenggarakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah.

- d) Mengkoordinir kegiatan Sekretaris dan Kepala Bidang lingkup Badan Pendapatan Daerah sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

b. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang *Sekretaris*, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan ketatalaksanaan bidang kepegawaian, keuangan serta perencanaan Badan Pendapatan daerah
2. Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Perencanaan
 - b) Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Umum dan Kepegawaian
 - c) Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Keuangan
3. Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a) Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat
 - b) Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat;
 - c) Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat dengan Kepala Badan serta para Kepala Bidang Lingkup Badan Pendapatan Daerah;
 - d) Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di lingkup sekretariat;

c. Sub Bagian Perencanaan

1. *Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian*, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan perencanaan Badan.

2. Sub Bagian Perencanaan memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a) Menyiapkan rancangan Rencana Strategis Sub Bagian Perencanaan.
- b) Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Perencanaan.
- c) Mengkoordinasikan Rancangan Rencana Strategis dan Rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian serta Dokumen Penetapan Kinerja Bagian dengan Sekretaris Dinas, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- d) Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja dilingkup Sub Bagiaannya.

d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kkearsipan, perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan urusan rumah tangga badan

2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas sebagai berikut:

- a) Menyiapkan dan merumuskan rancangan Rencana Strategis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b) Menyiapkan dan merumuskan Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian dengan Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Keuangan;
- d. Mengkoordinasikan tugas-tugas kerja dilingkup Sub Bagian;
- e. Sub Bagian Keuangan
 1. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan administrasi keuangan serta merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan.
 2. Sub Bagian Keuangan memiliki uraian tugas Sebagai berikut:
 - a) Menyiapkan dan merumuskan rancangan Rencana Strategis Sub Bagian Keuangan;
 - b) Menyiapkan dan merumuskan Rencana Kerja Anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - c) Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Sub Bagian Keuangan dengan Sekretaris Badan, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d) Mengkoordinasikan tugas-tugas kerja dilingkup Sub Bagian;

e) Membantu Sekretaris dalam pengelolaan urusan – urusan Keuangan Badan

f. Bidang Perencanaan, Pendaftaran dan Pendataan

1. *Bidang Perencanaan, Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang*, mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas pendapatan daerah dalam urusan perencanaan pendapatan daerah, pengelolaan data wajib pajak daerah dan retribusi daerah, objek pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan daftar induk wajib daerah dan retribusi daerah serta pemeriksaan terhadap laporan data wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan, Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di bidang perencanaan pendapatan, pendaftaran dan pendataan.

b) Pengaturan, Pelaksanaan dan Pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dibidang perencanaan pendapatan daerah, pendaftaran dan pendataan.

c) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

3. Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pendaftaran dan Pendataan adalah sebagai berikut :

a) Menyusun rencana perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada bidang perencanaan pendapatan dinas, pendaftaran dan pendataan.

b) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lain yang ada pada bidang perencanaan, pendaftaran dan pendataan.

c) Melaksanakan pelayanan urusan perencanaan pendapatan daerah serta pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

g. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan

1. Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang perencanaan, pendaftaran dan pendataan dalam urusan perencanaan pendapatan daerah, pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah.

2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan perencanaan pendapatan daerah.

b) Pengaturan, Pelaksanaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan perencanaan pendapatan daerah.

c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

3. Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan, adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan rancangan strategi perencanaan pendapatan daerah.
- b) Menyiapkan rancangan rencana anggaran satuan kerja sub bidang perencanaan pendapatan daerah.
- c) Menyiapkan dan mengkaji data potensi pendapatan daerah.

h. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang pendaftaran dan pendataan dalam urusan pengelolaan pendaftaran dan pendataan.

2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pendaftaran dan pendataan.
- b) Pengaturan, Pelaksanaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan pendaftaran dan pendataan.
- c) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

3. Uraian tugas Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan, adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun rumusan rencana kebijakan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah.

- b) Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan.
- c) Menyusun rumusan system dan mekanisme pendaftaran dan pendataan pajak daerah dan retribusi daerah.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

i. Bidang Penetapan dan Penerimaan lain-lain

1. Bidang Penetapan dan Penerimaan Lain-lain dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Kepala Bidang Pendapatan Daerah di Bidang Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Penerimaan Lain-lain yang sah dan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Transfer.
2. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penetapan dan Penerimaan lain-lain mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan kebijakan program kegiatan perhitungan dan penetapan pendapatan asli daerah.
 - b) Perumusan kebijakan pengelolaan lain-lain penerimaan yang sah dan dana transfer.
 - c) Pelaksanaan kebijakan penilaian perhitungan dan penetapan pendapatan asli daerah.
 - d) Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain yang sah dan dana transfer.
 - e) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi mengenai dana transfer.

3. Uraian Tugas Kepala Bidang Penetapan dan Penerimaan Lain-lain, adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun dan menetapkan rencana strategis bidang penetapan dan lain-lain penerimaan.
- b) Menyusun dan menetapkan rencana anggaran satuan kerja bidang penetapan dan penerimaan lain-lain.
- c) Mengkoordinasikan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja dengan pimpinan dan bidang lainnya.
- d) Mendistribusikan tugas-tugas kepada Kepala Sub Bidang yang ada pada lingkup bidang penetapan dan penerimaan lain-lain.

j. Sub Bidang Penetapan

1. Sub Bidang Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan dan Penerimaan Lain-lain dibidang urusan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah yang meliputi perhitungan, penetapan dan penerbitan objek dan subjek pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b) Pengaturan penyelenggaraan urusan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

c) Pelaksanaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

d) Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan pimpinan.

3. Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Penetapan, adalah sebagai berikut:

a) Melaksanakan perhitungan, penilaian dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.

b) Melaksanakan pemeriksaan terhadap kartu data baik pajak daerah, retribusi daerah dan BPHTB.

c) Melaksanakan perhitungan kembali pajak terhitung atas permohonan wajib pajak.

d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

k. Sub Bidang Penerimaan Lain-lain dan dana Transfer.

1. Sub Bidang Penerimaan Lain-Lain dan Dana Transfer dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan dan Penerimaan Lain-lain dibidang urusan penerimaan lain-lain dan dana transfer dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Penerimaan Lain-lain dan Dana Transfer mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan penerimaan lain-lain dan dana transfer.

- b) Pengaturan, Pelaksanaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan penerimaan lain-lain dan dana transfer.
- c) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Penerimaan Lain-Lain dan Dana Transfer, adalah sebagai berikut :

- a) Menginventarisasi seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan lain-lain yang sah.
- b) Menginventarisasi pendapatan dana yang bersumber dari dana transfer.
- c) Melakukan tugas tambahan yang diberikan pimpinan.

I. Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

1. Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembianan dan pengembangan kegiatan pembukuan, pelaporan, monitoring dan evaluasi pendapatan daerah serta mengadakan legalisasi dan pengadministrasian surat-surat berharga.
2. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengendalian benda berharga.

- b) Pengaturan, Pelaksanaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan, monitoring, evaluasi dan pengendalian benda berharga.
- c) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

3. Uraian Tugas Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan, adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun program kerja/kegiatan bidang pembukuan, pelaporan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada sub bidang yang ada pada bidangnya.
- c) Memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang lingkup bidang pembukuan, pelaporan baik lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

m. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

- 1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembukuan, Pelaporan dalam urusan pembukuan, pelaporan penerimaan daerah.
- 2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan penerimaan daerah.

- b) Pengaturan, Pelaksanaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan pembukuan, pelaporan penerimaan daerah.
- c) Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan.

3. Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan, adalah sebagai berikut :

- a) Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pada bidang pembukuan, pelaporan.
- b) Menyiapkan bahan perumusan standar operasional prosedur (SOP) pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- c) Mengkoordinir tugas-tugas yang ada pada Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

n. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian benda berharga.

1. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Benda Berharga dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pembukuan dan pelaporan dalam urusan monitoring, evaluasi pendapatan daerah dan pengendalian benda berharga.
2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Benda Berharga, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan monitoring, evaluasi penerimaan daerah dan pengendalian benda berharga.

b) Pengaturan, Pelaksanaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan monitoring, evaluasi penerimaan daerah dan pengendalian benda berharga.

c) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

3. Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Benda Berharga, adalah sebagai berikut :

a) Menyusun bahan perumusan rencana kegiatan pada Sub Bidang Monitoring, Evaluasi Penerimaan Daerah dan Pengendalian Benda Berharga.

b) Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas yang ada pada Sub Bidang Monitoring, Evaluasi Penerimaan Daerah dan Pengendalian Benda Berharga.

c) Mengkoordinasikan dan mendistribusikan tugas-tugas kepada setiap pegawai yang ada pada Sub Bidang Monitoring, Evaluasi Penerimaan Daerah dan Pengendalian Benda Berharga.

d) Melaksanakan rapat monitoring dengan SKPD Pengelola Pendapatan Daerah secara berkala.

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

o. Bidang Pembinaan dan Penagihan.

1. Bidang Pembinaan dan Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam bidang pembinaan, pengawasan terhadap pendapatan daerah serta kegiatan penagihan dan keberatan wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Didalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pembinaan dan Penagihan, mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan pembinaan dan penagihan.
 - b) Pengaturan, Pelaksanaan dan pengurusan penyelenggaraan urusan pembinaan dan penagihan.
 - c) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
3. Uraian Tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Penagihan, adalah sebagai berikut :
 - a) Menyusun program kerja/kegiatan bidang pembinaan dan penagihan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
 - b) Mengkoordinasikan dan mendistribusi tugas-tugas kepada Kepala Sub Bidang yang ada pada bidangnya.
 - c) Memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang lingkup bidang pembinaan dan penagihan baik secara lisan maupun tertulis agar pelaksanaan tugas-tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien.
 - d) Melaksanakan penyuluhan.

p. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

1. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembinaan dan Penagihan dalam urusan penyelenggaraan pembinaan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah.

2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan rencana kebijakan urusan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah.
- b) Pengaturan, Pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan daerah.
- c) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

3. Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan, adalah sebagai berikut :

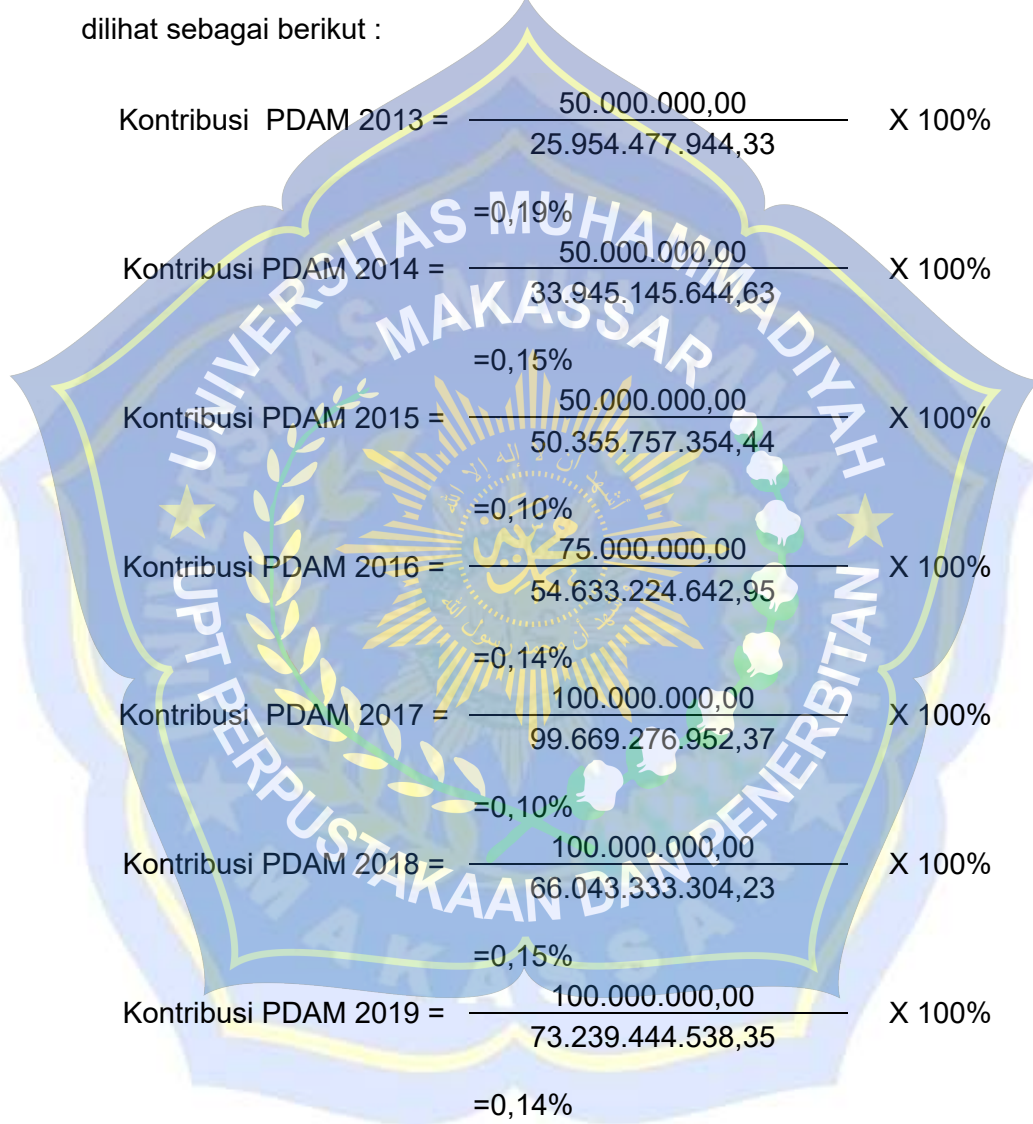
- a) Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan perencanaan program kegiatan Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan.
- b) Merumuskan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c) Membina dan mengkoordinasikan seluruh tugas-tugas yang ada pada Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan.

q. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

1. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas-tugas bidang pembinaan dan penagihan dalam urusan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta mengkoordinasikan seluruh laporan atau permohonan keberatan yang masuk.
2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Perumusan rencana kebijakan urusan penyelenggaraan penagihan dan keberatan.
 - b) Pengaturan, Pelaksanaan dan Pengawasan penyelenggaraan urusan penyelenggaraan penagihan dan keberatan.
 - c) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
3. Uraian Tugas Kepala Sub Bidang Penagihan dan Keberatan, adalah sebagai berikut :
 - a) Menyiapkan bahan perumusan perencanaan kebijakan pada program kegiatan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
 - b) Menyiapkan bahan pengurusan standar operasional (SOP) pada Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
 - c) Membina dan mengkoordinasi pegawai dalam melaksanakan tugas pada Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.

B. Hasil Penelitian

Besarnya kontribusi Badan Usaha Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang dalam 10 tahun terakhir dimana BUMD yang ada di Enrekang terdiri dari dua yaitu PDAM dan Bank BPD dapat dilihat sebagai berikut :



Kontribusi PDAM 2013 =	$\frac{50.000.000,00}{25.954.477.944,33}$	X 100%
	=0,19%	
Kontribusi PDAM 2014 =	$\frac{50.000.000,00}{33.945.145.644,63}$	X 100%
	=0,15%	
Kontribusi PDAM 2015 =	$\frac{50.000.000,00}{50.355.757.354,44}$	X 100%
	=0,10%	
Kontribusi PDAM 2016 =	$\frac{75.000.000,00}{54.633.224.642,95}$	X 100%
	=0,14%	
Kontribusi PDAM 2017 =	$\frac{100.000.000,00}{99.669.276.952,37}$	X 100%
	=0,10%	
Kontribusi PDAM 2018 =	$\frac{100.000.000,00}{66.043.333.304,23}$	X 100%
	=0,15%	
Kontribusi PDAM 2019 =	$\frac{100.000.000,00}{73.239.444.538,35}$	X 100%
	=0,14%	
Kontribusi PDAM 2020 =	$\frac{100.000.000,00}{78.247.324.549,96}$	X 100%
	=0,13%	
Kontribusi PDAM 2021 =	$\frac{100.000.000,00}{73.308.654.593,08}$	X 100%
	=0,14%	

$$\text{Kontribusi PDAM 2022} = \frac{100.000.000,00}{102.318.366.033,18} \times 100\% \\ = 0,10\%$$

**Tabel 4.1 : Kontribusi PDAM Terhadap PAD Kabupaten Enrekang
periode 2013-2022**

No	Tahun	Kontribusi PDAM(Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2013	50.000.000,00	25.954.477.944,33	0,19%
2	2014	50.000.000,00	33.945.145.644,63	0,15%
3	2015	50.000.000,00	50.355.757.354,44	0,10%
4	2016	75.000.000,00	54.633.224.642,95	0,14%
5	2017	100.000.000,00	99.669.276.952,37	0,10%
6	2018	100.000.000,00	66.043.333.304,23	0,15%
7	2019	100.000.000,00	73.239.444.538,35	0,14%
8	2020	100.000.000,00	78.247.324.549,96	0,13%
9	2021	100.000.000,00	73.308.654.593,08	0,14%
10	2022	100.000.000,00	102.318.366.033,18	0,10%
Rata-Rata				0,13%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab.Enrekang Tahun 2013-2022

Kontribusi PDAM Tirta Massenrempulu selama 10 tahun terakhir relative kecil dimana presentasi kontribusinya tidak mencapai 1%. Kontribusi yang kecil itu di sebabkan karena adanya perjanjian dengan pihak pemerintah bahwa pihak PDAM hanya di bebaskan kontribusi sebesar 100.000.000,00 adapun kelebihan dari laba PDAM di pergunakan untuk perbaikan dan pengembangan PDAM itu sendiri. Adapun kontribusi Bank BPD terhadap PAD Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Bank BPD 2013} = \frac{2.720.422.551,00}{25.954.477.944,33} \times 100\%$$

=10 %

$$\text{Kontribusi Bank BPD 2014} = \frac{2.862.293.695,00}{33.945.145.644,63} \times 100\%$$

=8 %

$$\text{Kontribusi Bank BPD 2015} = \frac{3.337.902.299,67}{50.355.757.354,44} \times 100\%$$

=7 %

$$\text{Kontribusi Bank BPD 2016} = \frac{4.751.158.746,00}{54.633.224.642,95} \times 100\%$$

=9 %

$$\text{Kontribusi Bank BPD 2017} = \frac{12.255.808.162,48}{99.669.276.952,37} \times 100\%$$

=12 %

$$\text{Kontribusi Bank BPD 2018} = \frac{13.496.908.237}{66.043.333.304,23} \times 100\%$$

=20 %

$$\text{Kontribusi Bank BPD 2019} = \frac{16.641.119.760}{73.239.444.538,35} \times 100\%$$

=23 %

$$\text{Kontribusi Bank BPD 2020} = \frac{15.312.302.384}{78.247.324.549,96} \times 100\%$$

=20 %

$$\text{Kontribusi Bank BPD 2021} = \frac{15.796.115.974}{73.308.654.593,08} \times 100\%$$

=22 %

$$\text{Kontribusi Bank BPD 2022} = \frac{13.366.084.356,00}{102.318.366.033,18} \times 100\%$$

=13 %

**Tabel 4.2: Kontribusi Bank BPD terhadap PAD Kabupaten Enrekang
periode 2013-2022**

NO	Tahun	Kontribusi Bank BPD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	kontribusi (%)
1	2013	2.720.422.551,00	25.954.477.944,33	10%
2	2014	2.862.293.695,00	33.945.145.644,63	8%
3	2015	3.337.902.299,67	50.355.757.354,44	7%
4	2016	4.751.158.746,00	54.633.224.642,95	9%
5	2017	12.255.808.162,48	99.669.276.952,37	12%
6	2018	13.496.908.237	66.043.333.304,23	20%
7	2019	16.641.119.760	73.239.444.538,35	23%
8	2020	15.312.302.384	78.247.324.549,96	20%
9	2021	15.796.115.974	73.308.654.593,08	22%
10	2022	13.366.084.356,00	102.318.366.033,18	13%
Rata-Rata				14%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang

Kontribusi Bank BPD terhadap Pendapatan Asli Daerah relative tinggi itu dilihat dari nilai kontribusi yang mencapai 23% pada tahun 2019, Adapun pada tahun 2022 mengalami penurunan nilai kontribusi menjadi 13% yang disebabkan karena kontribusi dari sumber lain seperti pajak, retribusi dan lain-lain mengalami peningkatan.

Adapun nilai kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah secara kumulatif yaitu dimana nilai kontribusi PDAM di tambahkan dengan nilai kontribusi Bank BPD yaitu dapat dilihat sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi BUMD 2013} = \frac{2.770.422.551,00}{25.954.477.944,33} \times 100\%$$

=11 %

$$\text{Kontribusi BUMD 2014} = \frac{2.912.293.695,00}{33.945.145.644,63} \times 100\%$$

=9 %

$$\text{Kontribusi BUMD 2015} = \frac{3.387.902.299,67}{50.355.757.354,44} \times 100\%$$

=7 %

$$\text{Kontribusi BUMD 2016} = \frac{4.826.158.746,00}{54.633.224.642,95} \times 100\%$$

=9 %

$$\text{Kontribusi BUMD 2017} = \frac{12.355.808.162,48}{99.669.276.952,37} \times 100\%$$

=12 %

$$\text{Kontribusi BUMD 2018} = \frac{13.596.908.237}{66.043.333.304,23} \times 100\%$$

=21 %

$$\text{Kontribusi BUMD 2019} = \frac{16.741.119.760}{73.239.444.538,35} \times 100\%$$

=23 %

$$\text{Kontribusi BUMD 2020} = \frac{15.412.302.384}{78.247.324.549,96} \times 100\%$$

=20 %

$$\text{Kontribusi BUMD 2021} = \frac{15.896.115.974}{73.308.654.593,08} \times 100\%$$

=22 %

$$\text{Kontribusi BUMD 2022} = \frac{13.466.084.356,00}{102.318.366.033,18} \times 100\%$$

=13 %

Tabel 4.3: Kontribusi BUMD terhadap PAD kabupaten Enrekang**Periode 2013-2022**

NO	Tahun	Kontribusi BUMD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	kontribusi (%)
1	2013	2.770.422.551,00	25.954.477.944,33	11%
2	2014	2.912.293.695,00	33.945.145.644,63	9%
3	2015	3.387.902.299,67	50.355.757.354,44	7%
4	2016	4.826.158.746,00	54.633.224.642,95	9%
5	2017	12.355.808.162,48	99.669.276.952,37	12%
6	2018	13.596.908.237	66.043.333.304,23	21%
7	2019	16.741.119.760	73.239.444.538,35	23%
8	2020	15.412.302.384	78.247.324.549,96	20%
9	2021	15.896.115.974	73.308.654.593,08	22%
10	2022	13.466.084.356,00	102.318.366.033,18	13%
Rata-Rata				15%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang

Berdasarkan Uraian tabel diatas dapat di ketahui bahwa BUMD yang memberikan kontribusi yang besar yaitu Bank BPD pada tahun 2019 dengan nilai kontribusi 23% dan BUMD yang memberikan kontribusi paling kecil yaitu PDAM pada tahun 2015,2017 dan pada tahun 2022 yaitu sebesar 0.10%

Berbeda dengan Bank BPD,PDAM sendiri hanya menyetorkan labanya sesuai dengan kesepakatan dengan pihak Pemerintah Daerah (PEMDA) dimana kesepakatan itu hanya mewajibkan pihak PDAM Menyetor labanya sebesar 75.000.000,00 pada tahun 2016 dan 100.000.000,00 pada tahun 2017-sekarang, sedangkan dana yang tersisa di pihak PDAM di pergunakan untuk perbaikan di beberapa cabang PDAM yang ada di kabupaten Enrekang.

C. Pembahasan

Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang Pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 2% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 11%. Pada tahun 2015 dan 2016 masih belum mampu mencapai nilai kontribusi yang telah didapatkan pada tahun 2013, dan pada tahun 2017 mampu memberikan nilai kontribusi sebesar 12%.

Pada tahun 2018 kontribusi BUMD mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu mencapai 21% dan tahun 2019 memberikan kontribusi terbesar dalam 10 tahun terakhir yaitu 23% dari total PAD yang didapatkan.

Pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 3% karena hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 20%, kemudian pada tahun 2021 kembali naik dan pada tahun 2022 mengalami penurunan secara drastis yaitu hanya sebesar 13% dari total PAD yang ada di Kabupaten Enrekang.

Secara Kumulatif Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kabupaten Enrekang memberikan presentase kontribusi sebesar 15% dan dikategorikan kurang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang sesuai dengan kriteria yang ada yaitu apabila mencapai 11-20 maka dikategorikan kurang berkontribusi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jouzar Farouq Ishak, Ridwan Zulpi Agha, Eliza Noviriani, dan U. Ari Alrizwan dengan judul Kontribusi dan Efektivitas Laba Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa kontribusi maupun efektivitas laba badan usaha milik daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rindi Safira dan Muhammad Yafiz dengan judul Analisis Pengaruh Kontribusi BUMD Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMD berkontribusi baik terhadap PAD di Sumatera Utara.

Semakin besar nilai Kontribusi suatu Badan Usaha Milik Daerah Maka akan mempengaruhi nilai Pendapatan Asli Daerah, dimana Nilai PAD adalah salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam mewujudkan kemandirian suatu daerah tertentu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Enrekang maka dapat di simpulkan bahwa Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang dalam rentan waktu 2013-2022 memiliki rata-rata sebesar 15% dimana kontribusi tertinggi yang pernah di capai yaitu 23% pada tahun 2019 dan kontribusi terkecil yaitu 9% yaitu pada tahun 2014 dan 2016 jadi secara kumulatif BUMD di Kabupaten Enrekang memberikan kontribusi yang masih sangat kurang karena hanya mencapai nilai kontribusi sebesar 15% selama 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 2013-2022.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang di kemukakan diatas, maka adapun saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Daerah seharusnya memanfaatkan dengan baik potensi-potensi yang ada di Kabupaten Enrekang dengan mendirikan beberapa badan usaha sehingga BUMD bisa berkontribusi baik terhadap pendapatan daerah.
2. Pemerintah Daerah harus memberikan target Kepada PDAM yang lebih besar dari sebelumnya supaya nilai kontribusi yang di berikan

bisa memiliki dampak yang lebih besar lagi terhadap pembangunan daerah.

3. Pemerintah Daerah harus berupaya secara maksimal dalam mengambil peluang usaha melalui upaya kerja sama yang saling menguntungkan dengan pihak lain.
4. Pemerintah Daerah harus Mengupayakan Pembuatan Website sehingga semua data keuangan atau semacamnya bisa di akses oleh semua lapisan masyarakat di Kabupaten Enrekang.



DAFTAR PUSTAKA

- Azfril, (2018). *Analisis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang*. Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
- Ghozali, I. 2016. *Apikasi Analisis Multivariate dengan Prgram SPSS 23*. Semarang; Undip
- Halim, A. (2007). *Analisis sektor Publik Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Ismail,A. (2022). *Analisis Peran Badan Usaha Milik Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada PDAM Tirta Batanghari)*. Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi
- Lazuardi, M. *Analisis Kontribusi Retribusi Daerah dan Laba Bumd terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 1 No. 2, 2018, hal 1-20
- Luigi Lauren Derosario Berwulo, Vecky A. J Masinambow, dan Patrick C. Wauran. *"Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura"*. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado vol 17 No 01 (2017).
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka, 2004.
- Nurmiati, Fina Diana, Murhayani (2019). *Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Patria Artha.
- Peraturan Bupati Enrekang No 190 Tahun 2021 *tentang Tugas Pokok,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No 6 Tahun 2020 *tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No 10 Tahun 2018 *tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No 10 Tahun 2019 *tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No 13 Tahun 1986 *tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Enrekang*.
- Pp No. 54 Tahun 2017 *tentang Badan Usaha Milik Daerah*
- Racmawati (2004). *Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)*
- Samidi. (2021). *Model Bisnis Dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan Badan*

Usaha Milik Daerah (BUMD). Pekalongan : NEM

Soegiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta

UU Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yudho Taruno. (2017). *Tata Kelola BUMD*. Solo : Intrans Publishing





Lampiran 1. Data BUMD dan PAD Kab.Enrekang Periode 2013-2022

LAPORAN PAD & HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
TAHUN 2013-2016				
URAIAN	REALISASI (Rp)			
	2013	2014	2015	2016
HSL. PENG. KEK. DAERAH YG DIPISAHKAN	2.770.422.551,00	2.912.293.695,00	3.387.902.299,67	4.826.158.746,00
Perusahaan daerah Air Minum (PDAM)	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00
Bank Pembangunan Daerah (BPD)	2.720.422.551,00	2.862.293.695,00	3.337.902.299,67	4.751.158.746,00
TOTAL PAD	25.936.477.944,33	33.945.145.641,63	50.355.757.351,44	54.633.224.642,95

REALISASI PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN ENREANG TAHUN 2011 - 2012

[illegible]

No	Tahun	Kontribusi PDAM	Kontribusi Bank BPD	Realisasi PAD
1	2013	50.000.000,00	2.720.422.551,00	25.954.477.944,33
2	2014	50.000.000,00	2.862.293.695,00	33.945.145.644,63
3	2015	50.000.000,00	3.337.902.299,67	50.355.757.354,44
4	2016	75.000.000,00	4.751.158.746,00	54.633.224.642,95
5	2017	100.000.000,00	12.255.808.162,48	99.669.276.952,37
6	2018	100.000.000,00	13.496.908.237	66.043.333.304,23
7	2019	100.000.000,00	16.641.119.760	73.239.444.538,35
8	2020	100.000.000,00	15.312.302.384	78.247.324.549,96
9	2021	100.000.000,00	15.796.115.974	73.308.654.593,08
10	2022	100.000.000,00	13.366.084.356,00	102.318.366.033,18



[illegible]

Lampiran 3



Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4



Wawancara dengan Salah satu staf Dinas yang terkait.



Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIM PINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.239 Makassar 90222 Telp.(0411) 869972-861593, Fax (0411) 865388

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muhammad Dirham
Nim : 105711101419
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Dengan nilai

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	75%	10%
2	Bab 2	15%	25%
3	Bab 3	10%	10%
4	Bab 4	3%	10%
5	Bab 5	0%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperunya.

Makassar, 22 Juli 2023

Mengetahui

Ketua UPT - Perpustakaan dan Penerbitan



Muhammad M.I.P
NIM. 964 591

Surat Keterangan Bebas Plagiat



Muhammad Dirham 105711101419 Bab I

7%

LIBRARY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

LIBRARY SOURCES



doku pub



lit.e-journal.id



dan.jambi.ac.id



www.educetak.org



www.researchgate.net



230x.com

2%

1%

1%

1%

1%

1%





Muhammad Dirham
105711101419 Bab II
by Rahma Nur

Submission date: 21-04-2023 10:47:00 (UTC+0500)
Submission ID: 2194455331
File name: IIRAL_2023-07-21T194218.522.docx
Word count: 2759
Character count: 18487

Muhammad Dirham 105711101419 Bab II

15%
LIKARTY INDEX

14%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

2%
STUDENT PAPERS

Internet Sources

1 eprints.polsri.ac.id
Internet Source

5%

2 ejournal.unsrat.ac.id
Internet Source

2%

3 digilib.unin.uns.ac.id
Internet Source

1%

5 Submit to Universitas Islam Jakarta
Internet Paper

1%

1 simki.unpkediri.ac.id
Internet Source

1%

1 bangjurnal.com
Internet Source

1%

1 jurnal.darmajaya.ac.id
Internet Source

1%

3 uide-journal
Internet Source

1%

9 ppjp.ulm.ac.id
Internet Source

1%



10

repository.stieipwija.ac.id
Internet Source

11

eprints.poltektegal.ac.id
Internet Source

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches

1%



Muhammad Dirham

1057111014129 Bab III



Submission date: 27 Jul 2023 10:09:09 UTC+0700

Submission ID: 213405053

File name: 340_20230727-213405053.pdf

Word count: 111

Character count: 475

Muhammad Dirham 105711101419 Bab III

Similarity Report

	10%	10%	0%	4%
	SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
Internet Sources				
1 adoc.pub				2%
2 issuu.com				2%
3 docobox.com				1%
4 docplayer.info				1%
5 core.ac.uk				1%
6 repository.usn.ac.id				1%

Hide quotes On
Hide bibliography On

Exclude matches 1%



Submission Date: 21-Jul-2023 03:45PM (UTC+0700)

Submission ID: 2134458728

File name: BAB IV - 2023-07-21T15:42:29.761.docx (258.49K)

Word count: 4103

Character count: 28364



Muhammad Dirham

195711101419 Bab V

by Tahap Tutup



Submission date: 21-Jul-2023 16:00 PM (UTC+0700)

Submission ID: 2134439906

File name: BAB V 2023-07-21T154223.1.pdf

Word count: 195

Character count: 1432



BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Dirham Jamaludin panggilan Dirham (Ijul) lahir di Rante Limbong pada tanggal 23 September 2000 dari pasangan suami istri Bapak Drs. Jamaluddin dan Ibu Ida Ely, S.Ag., M.Pd. Peneliti adalah anak Pertama dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jln.Tidung X, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 130 Rante Limbong, lulus tahun 2013. MTS Guppi Buntu Barana lulus tahun 2016. MA Guppi Buntu Barana lulus tahun 2019 dan pada tahun yang sama (2019) penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan. Penulis juga aktif di internal kampus Universitas Muhammadiyah Makassar di UKM Pemerhati Alam Dan Lingkungan (PAHALA UNISMUH), Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan (HIMAJEP). Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.